



Judul : Ketua DPR Jamin Kinerja Dewan tidak Terganggu
Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Ketua DPR Jamin Kinerja Dewan tidak Terganggu

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan walaupun Pemilu 17 April 2019 sudah di depan mata, kinerja DPR tidak surut. Menjelang penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2018-2019 pada awal April mendatang, DPR sudah menyelesaikan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia perihal kerja sama di bidang pertahanan.

“Selain itu, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini dibahas Komisi VIII juga sudah memasuki babak akhir. Kita harapkan pekan ini selesai karena pembahasan dengan pemerintah sudah mencapai titik temu,” ujar Bamsoet seusai menerima *trophy Parliament of the Year* dari Teropong Senayan, di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin.

Legislator dari dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Ban-

jarnegara, dan Kebumen itu menjelaskan, selain RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPR juga menargetkan penyelesaian RUU tentang Perkoperasian, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, RUU Ekonomi Kreatif, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

dengan komisi terkait di DPR,” jelas Bamsoet.

Sementara itu, rapat paripurna DPR, kemarin, hanya dihadiri 24 anggota dewan. Berdasarkan penghitungan jumlah kursi yang terisi saat rapat, diketahui hanya 24 anggota dewan yang hadir saat rapat dibuka pukul 11.00 WIB. Jumlah tersebut jauh di bawah batas minimal kuorum, yakni 280 plus 1 atau 281 anggota dewan.

Namun, pemimpin rapat Utut Adianto menyebut total anggota yang hadir dan izin berjumlah 293 orang.

“Berdasarkan catatan, anggota yang hadir dan izin berjumlah 293 orang. Dengan ini rapat kuorum,” ujar Utut ketika membuka rapat.

Bamsoet memastikan walaupun Pemilu 2019 sudah di depan mata, kinerja DPR tidak boleh surut. “Agenda-agenda kelembagaan tidak boleh terhambat oleh agenda pemilu, apalgi yang bersifat pribadi,” tegasnya. (Pro/P-2)

Walaupun Pemilu 2019 sudah di depan mata, kinerja DPR tidak boleh surut karena alasan pemilu.

“Namun, penyelesaian berbagai RUU tersebut terkena keterdalaan karena ketidakhadiran pemerintah dalam rapat kerja